

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partisipasi

Secara etimologis konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata “*part*” yang berarti bagian. Jika kata “*part*” dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “*to participate*”, yang bermakna turut ambil bagian.¹

Sebagai masyarakat yang hidup di negara demokratis seyogyanya masyarakat ambil bagian dalam kegiatan politik karena masyarakat demokratis salah satunya tak bersifat apatis dalam kegiatan politik sebaliknya mereka aktif menyuarakan suara mereka dalam politik, tak penting posisi mereka sebagai apa yang terpenting mereka telah menunjukkan apa yang memang seharusnya dilakukan oleh masyarakat demokratis. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan juga tercantum dalam ayat suci Al-Qur’an, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 59

¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana 2010), h. 177.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*²

Disamping beberapa ayat dalam Al-Qura’an yang menjelaskan tentang pentingnya partisipasi politik (musyawarah) dan kepemimpinan, hal itu juga tercantum dalam hadis nabi. Salah satu hadis nabi yang menerangkan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُنتُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata ”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu*

² Al Qur’an Surat An-Nisa ayat 59

*kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*³

Partisipasi juga dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta, yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan publik, baik yang memiliki dimensi politik maupun non politik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga, misalnya dalam kegiatan pemilihan umum. Warga merancang tempat dan lokasi pemilihan sedemikian rupa supaya warga tertarik datang ke tempat pemungutan suara. Kegiatan seperti ini adalah bentuk dari partisipasi politik.⁴

Partisipasi dalam pemilihan adalah partisipasi politik yang sangat mendasar bahkan mungkin saat ditanyakan contoh partisipasi politik itu apa saja kepada orang awam mungkin yang terlintas di pikiran mereka pemilihan umum, partisipasi dalam pemilihan umum bisa menjadi acuan apakah masyarakat peduli terhadap politik atau bersikap apatis, karena bisa saja apa yang mereka pilih bisa menentukan masa depannya sehingga pemilu jangan hanya dianggap aktifitas yang sepele.

³ Imam nawawi, *Kitab Riyadhus Shalihin*

⁴ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik,*, h. 177-178.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.⁵

Dalam negara demokratis sudah menjadi keharusan dimana rakyat terlibat dalam partisipasi politik, karena demokrasi itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁶

Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi sehingga tindakan dan partisipasi yang kita lakukan ada payung hukumnya, yaitu demokrasi yang terbatas oleh aturan dan konstitusi.⁷

⁵ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan* (Bandung, Mandar Maju, 2007) Cet. III, h.165.

⁶ Nadiroh, *Prospek dan Tantangan Civil Society Di Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Keluarga, 2008), Cet Ke.II, h.33.

⁷ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2010), h.266.

B. Pengertian Partisipasi Politik

Pada awalnya, studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direct action*.⁸

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan

⁸ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik, Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi* (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 229.

politik, akan tetapi keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Sesuai dengan istilah partisipasi, maka partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik berupa kebijakan publik. Kegiatan warga negara pada dasarnya dibagi dua, yakni : (1) mempengaruhi isi kebijakan umum, dan (2) ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik, dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik, tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik.

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat lumrah di dalam negara demokrasi dimana setiap masyarakat memiliki hak untuk turut serta dalam kegiatan politik hal itu bisa berupa bermacam-macam bentuk dari mulai pemilihan sampai kampanye dimana partisipasinya mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi.

Herbert Mac Closky, seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung,

dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong terutama adalah tidakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.⁹

Dalam hubungan dengan negara-negara baru, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran yang lebih luas : partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk mencapai tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu serta untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan

⁹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*. (Jakarta : Gramedia, 2008) h.1

pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individu dan kolektif. Individu adalah perorangan, sedangkan kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak untuk memengaruhi penguasa. Partisipasi politik kolektif dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif yang konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional (agresif), seperti pemogokan yang tak sah, menguasai bangunan umum, dan huru-hara. Selanjutnya, partisipasi politik kolektif secara agresif dibedakan menjadi dua, yaitu aksi yang kuat dan aksi yang lemah.¹⁰

Dalam menghadapi partisipasi politik selanjutnya, dijelaskan pula sejumlah konsep rambu-rambu politik. Hal ini penting, dalam rangka melakukan reaktualisasi dan revitalisasi partisipasi politik publik, sehingga tak tercipta pemahaman yang berbeda-beda atas apa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik. Ramlan Surbakti

¹⁰. Basrowi, dkk.,(Ed.) *Sosiologi Politik*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 72

mengemukakan rambu-rambu konsep partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi.
- b. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah, selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk ke dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuatan dan pelaksana keputusan politik dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
- c. Kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah, termasuk dalam konsep partisipasi politik.
- d. Kegiatan mempengaruhi pemerintah bisa dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung.
- e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah bisa melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (non violence) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat,

maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence), seperti demonstrasi (unjuk rasa) dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.¹¹

Partisipasi politik sebagai kegiatan, dapat dibedakan menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Yang termasuk partisipasi politik aktif diantaranya adalah kegiatan mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah dan lain sebagainya. Lebih lanjut, bahwa partisipasi politik aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada input dan output politik. Sedangkan yang termasuk politik pasif dapat berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output politik.

C. Tipologi Partisipasi Politik

Di setiap negara demokrasi kebebasan adalah salah satu hal yang dijunjung tinggi, sehingga kritik politik cukup baik dan terbuka di negara demokratis, dimana masyarakat bisa mengkritisi kebijakan

¹¹ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*,, h. 233-234

pemerintah, bahkan, menurut Lipson ada 3 aspek positif dari sistem demokrasi, yaitu (1) demokrasi menghargai martabat manusia; (2) sistem demokrasi memberi peluang kepada individu-individu untuk menaruh perhatian terhadap masalah-masalah bersama; (3) melalui pendidikan politik, demokrasi dapat memberikan kontribusi bagi peradaban manusia.¹²

1. Tipologi Partisipasi Politik Menurut David F. Roth dan Frank L Wilson

Dalam buku *the comparative study of politics* yang dikutip oleh Damsar, Roth dan Wilson membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi. Pandangan Roth dan Wilson tentang piramida politik menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya.

Menurut Roth and Wilson ada 4 bentuk partisipasi politik yaitu aktivis, partisipan pengamat dan apolitis.

- a. Aktivis yaitu intensitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas politik misalnya pemimpin dan para

¹² Muslim Mufti, dkk.,(Ed.) *Teori-Teori Demokrasi* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 191.

fungsiionaris partai atau kelompok kepentingan, serta anggota partai atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara penuh waktu (full time), termasuk dalam kategori ini adalah kegiatan politik yang dipandang menyimpang atau negatif seperti pembunuh politik, teroris atau pelaku pembajakan untuk meraih tujuan politik.

- b. Partisipan yaitu kelompok ini mencakup berbagi aktivitas seperti petugas dan juru kampanye, mereka yang terlibat dalam program atau proyek sosial, sebagai pelobi politik, aktif dalam partai politik dan kelompok kepentingan.
- c. Pengamat yaitu mereka ikut dalam kegiatan politik yang tidak banyak menyita waktu, tidak menuntut prakarsa sendiri, tidak intensif dan jarang melakukannya. Misalnya memberikan suara dalam pemilihan umum (legislative dan eksekutif) dan mendiskusikan isu politik.
- d. Apolitis yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik, mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik.¹³

¹³ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*,, h.184.

Tingkatan politik di atas menyinggung seberapa besar atau tinggi intensitas seseorang atau sekelompok orang dalam aktifitas politik, dengan adanya tingkatan-tingkatan tersebut bisa mmenjadi penjelas antara satu orang dengan orang lainnya dalam artian termasuk ke ranah apakah mereka apakah pengamat, partisipan ataukah aktivis. Semuanya punya peran yang vital dalam perpolitikan dan tidak etis jika kita mengesampingkan salah satunya karena semuanya sangat penting.

2. Tipologi Partisipasi Politik Menurut Michael Rush dan Philip Althoff

Rush dan Althoff menyatakan bahwa hierarki yang terdapat partisipasi politik yaitu tergantung dari akibat yang disebabkan terhadap sistem politik, tingkatan-tingkatan khusus menyebabkan akibat besar pada suatu sistem politik, dan akibat kecil atau tanpa mempunyai akibat apapun pada sistem lainnya.

Tingkatan partisipasi politik ini disampaikan oleh Michael Rush dan Philip Althoff diantaranya adalah menduduki jabatan politik atau administratif, mencari jabatan politik atau administratif, keanggotaan aktif suatu organisasi politik, keanggotaan pasif suatu organisasi politik, keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, keanggotaan

pasif suatu organisasi semu politik, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya, partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik, voting (pemberian suara).

Tingkatan partisipasi politik ini mencerminkan kapasitas partisipan dalam berpartisipasi politik. Semakin tinggi tingkatan yang ditempati oleh seseorang atau sekelompok orang, maka semakin tinggi pula tingkatan partisipasi politiknya. Namun tidak demikian dengan lingkup partisipasi politiknya, semakin tinggi malah semakin sedikit, artinya semakin mengerucut pada jumlah orang tertentu.¹⁴

3. Tipologi Partisipasi Politik Menurut Gabriel A Almond

Dalam buku perbandingan sistem politik yang dikutip oleh Damsar, Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan non konvensional. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern. Sementara itu Partisipasi politik non konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim

¹⁴ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*,, h.240.

dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Partisipasi konvensional adalah kegiatan partisipasi biasa seperti pemberian suara dalam pemilihan sementara nonkonvensional adalah partisipasi politik tingkat tinggi seperti misalnya kudeta demonstrasi dan sebagainya.

4. Tipologi Partisipasi Politik Menurut Robert D Putnam

Pandangan Putnam tentang tipologi partisipasi politik sebenarnya tidak langsung. Dalam buku perbandingan sistem politik yang disunting oleh Mas'ood dan Mac Andrew, Putnam membuat suatu model skematis stratifikasi sosial politik. Model tersebut dibangun berdasarkan data dari beberapa negara tentang proporsi warga negara yang terlibat dalam berbagai tingkat kegiatan politik. Pada puncak piramida terdapat kelompok pembuat keputusan (*proximate decision makers*), yaitu individu-individu yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijaksanaan nasional.

Tipologi partisipasi politik menurut Putnam ada 5 yaitu kaum berpengaruh, aktivis, publik peminat politik dan pemilih (*voters*) dan non partisan.

- a. Kaum berpengaruh (*influential*) yaitu individu-individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat, mereka-mereka yang dimintai nasihat oleh para pembuat keputusan, yang kepentingan-kepentingannya dan pendapat-pendapatnya diperhitungkan oleh para pembuat keputusan itu.
- b. Aktivis (*activist*), yaitu warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah, mungkin sebagai anggota partai, birokrat tingkat menengah, atau editor-editor surat kabar lokal, atau mungkin pula melalui cara yang agak lebih privat, seperti aktif menulis surat kepada anggota parlemen.
- c. Publik peminat politik (*attentive public*), yaitu orang-orang yang menganggap kehidupan politik seperti halnya tontonan yang sangat menarik. Kelompok ini berbeda dengan sebagian besar warga negara akibat luar biasa besarnya perhatian yang mereka berikan terhadap masalah-masalah pemerintahan dan kemasyarakatan.
- d. Pemilih (*voters*), yaitu kelompok warga negara yang melakukan aktivitas politik pada saat pemilihan umum saja. Lapisan ini

merupakan lapisan terbesar dari bangunan piramida stratifikasi.

- e. *Non partisan*, yaitu mereka yang tidak melakukan kegiatan politik.¹⁵

5. Tipologi Partisipasi Politik Menurut Lester Milbrath

Lester Milbrath mengajukan tiga tipe partisipasi politik, yaitu tipe penonton, tipe transisional dan tipe gladiator untuk jelasnya siapa masuk tipe mana dalam suatu partisipasi politik yang dilakukan oleh warga.

Milbrath mengemukakan ada 3 tipe partisipasi politik yaitu tipe penonton, tipe transisional dan tipe gladiator.

- a. Tipe penonton meliputi ketertarikan diri sendiri pada stimuli politik, mengikuti pemilihan umum (legislatif dan eksekutif) , menginisiasi suatu diskusi politik, berusaha mendekati orang lain untuk ikut memilih dengan cara tertentu, dan menempelkan stiker pada kendaraan.

¹⁵ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, , h.186-188.

- b. Tipe transisional mencakup kegiatan menjalin kontak dengan pejabat publik atau pemimpin politik, memberikan sumbangan finansial pada partai politik atau kandidat, dan mengikuti suatu pertemuan atau perjalanan politik.
- c. Tipe gladiator terdiri dari berbagai kegiatan antara lain menghabiskan waktu dalam suatu kampanye politik, menjadi anggota aktif dalam suatu partai politik, menghadiri suatu kaukus atau pertemuan strategi, memajukan pengumpulan dana politik, menjadi kandidat untuk suatu jabatan, dan menjadi pejabat publik dan partai politik.¹⁶

Di tingkat individu, secara lebih spesifik, Milbrath M.L. Goel mengidentifikasi tujuh bentuk partisipasi politik individual diantaranya:

- a. *Apathetics inactives* yaitu tidak beraktifitas yang partisipatif, tidak pernah memilih.
- b. *Passive supporters* yaitu memilih secara regular / teratur, menghadiri parade patriotik, membayar seluruh pajak, ”mencintai negara”.

¹⁶ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik,*, h.189-190

- c. *Contact specialist* yaitu pejabat penghubung lokal (daerah), provinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu.
- d. *Communicators* yaitu mengikuti informasi-informasi politik, terlibat dalam diskusi-diskusi, menulis surat pada editor surat kabar, mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin politik.
- e. *Party and campaign workers* yaitu bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, menghadiri pertemuan-pertemuan, menyumbang uang pada partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung partai politik, dipilih menjadi kandidat partai politik.
- f. *Community activists* yaitu bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal, membentuk kelompok untuk menangani problem-problem lokal, keanggotaan aktif dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial.
- g. *Protesters* yaitu bergabung dengan demonstrasi-demonstrasi publik di jalanan melakukan kerusuhan bila perlu, melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah,

menghadapi pertemuan-pertemuan, protes menolak mematuhi aturan-aturan.¹⁷

Partisipasi menjadi hal yang menarik di negara demokratis karena masyarakat bisa turut memantau bahkan terlibat dalam jalannya pemerintahan dengan adanya partisipasi politik memberikan kesempatan kepada masyarakat biasa untuk memberikan suara atau tanggapannya terhadap suatu hal, tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi Pancasila sehingga dalam praktik demokrasi kita haruslah beradab, seperti yang diungkapkan oleh Notonagoro dalam buku yang ditulis oleh Nadiroh dengan judul "*Prospek dan Tantangan Civil Society di Indonesia*" bahwa *'demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan yang maha esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.'*¹⁸ Hal itulah yang harus tertanam dalam jiwa demokratis masyarakat Indonesia.

¹⁷ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*, h.235-236.

¹⁸ Nadiroh, *Prospek dan Tantangan Civil Society di Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Keluarga, 2008), Cet Ke.II, h.34.

D. Alasan Partisipasi Politik

Dalam kenyataan pada kehidupan politik, tidak sedikit warga negara yang menghindari atau tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap aktivitas politik. Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan.

Morris Rosenberg menyatakan ada tiga alasan kenapa orang bersifat apatis dalam aktivitas politik, yaitu:

- a. Aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupannya. Setiap keputusan pasti ada biaya atau resikonya. Oleh sebab itu, jika seseorang menganggap bahwa keterlibatan dalam aktivitas politik akan mendatangkan risiko bagi berbagai aspek kehidupannya, maka apatis merupakan pilihan terbaik bagi dirinya.
- b. Aktivitas politik dipandang sebagai suatu kerja yang sia-sia. Interpretasi individu terhadap realitas politik sebagai suatu kerja yang bermanfaat atau sebaliknya sesuatu hal yang sia-sia, akan mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam politik.
- c. Ketiadaan faktor untuk "memacu diri untuk bertindak" atau disebut juga sebagai "perangsang politik". Sebagai makhluk yang rasional setiap individu tahu apa yang diinginkannya. Apabila kebutuhan material dan immaterial tidak akan

diperolehnya ketika akan melakukan aktivitas politik, maka tidak ada rasional atau faktor yang mendorong individu beraktifitas politik.¹⁹

Seseorang melakukan aktivitas politik karena empat alasan yaitu alasan rasional nilai, alasan emosional afektif, alasan tradisional dan alasan rasional instrumental.

- a. *Alasan rasional nilai*, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok. Perdebatan tentang rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional dan rancangan undang-undang tentang pornografi menyita keterlibatan massif dari berbagai pihak kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki berbagai kepentingan nilai (agama dan budaya).
- b. *Alasan emosional afektif*, yaitu alasan yang didasarkan atas kebencian atau sukacita terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu. Alasan partisipasi politik seperti ini cenderung nonrasional. Ketika mengikuti suatu pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, kepala daerah atau kepala desa, tidak jarang orang terlibat karena alasan emosional afektif.

¹⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*,, h.191-192.

- c. *Alasan tradisonal*, yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok sosial. Pada kelompok masyarakat tertentu, tradisi dijunjung tinggi, misalnya kaum laki-laki yang hanya dibolehkan aktif di ranah publik, sedangkan perempuan diharapkan lebih mendominasi ranah domestik, sehingga akan mempengaruhi pola partisipasi politik mereka.
- d. *Alasan rasional instrumental*, yaitu alasan yang didasarkan atas kalkulasi untung rugi secara ekonomi.²⁰

Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat semakin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. Modernisasi terjadi ketika penduduk kota baru, seperti : buruh, pedagang dan kaum professional, merasa mereka dapat mempengaruhi nasib mereka melalui pelibatan dirinya dalam setiap aktivitas pemerintahan, maka dengan

²⁰Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*,, h.197-198.

asumsi yang telah terbangun tersebut mereka semakin menuntut untuk ikut aktif dalam proses kepolitikan.

- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Lahir dan meningkatnya partisipasi politik publik dapat dipengaruhi juga oleh perubahan-perubahan struktur kelas sosial di masyarakat. Ketika perubahan sosial terjadi, lambat laun akan terbentuk suatu kelas-kelas sosial baru yang sama sekali tidak pernah ada dalam masyarakat tradisional sebelumnya. Di antara terbentuknya kelas-kelas sosial baru adalah kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Melalui kaum intelektual dan media komunikasi modern, ide demokratisasi partisipasi telah tersebar ke bangsa-bangsa baru merdeka jauh sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. Melalui dua institusi inilah (kaum intelektual dan media komunikasi modern) kemudian terdorong partisipasi politik publik yang bergelombang.

- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik. Bahwa partisipasi dalam masyarakat semakin meningkat oleh karena adanya konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik. Dalam kasus yang lalu, bagaimana konflik diantara pemimpin politik dapat mendorong lahirnya partisipasi politik publik, dapat diperhatikan dalam konteks klas-klas menengah abad 16, 17, 18, yang berjuang melawan kaum aristocrat.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan, ternyata menuai kritik yang pada akhirnya memperluas partisipasi politik warga. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah di pelbagai peri kehidupan, sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir dari warga untuk ikut serta secara aktif dalam pembuatan keputusan publik, karena warga berasumsi bahwa monopoli kebijakan-kebijakan yang tak implementatif dan akan bias kebutuhan.²¹

Dalam buku simpul-simpul dinamika strategi pembangunan “*good governance*” dikemukakan ada beberapa alasan seseorang untuk berpartisipasi dalam politik, meskipun barangkali wujud partisipasi

²¹ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*,, h.231-233

antara seseorang dengan orang lain sama, akan tetapi makna partisipasi bagi masing-masing anggota masyarakat bisa sangat berbeda. Erat kaitannya dengan makna partisipasi adalah motivasi yang masing-masing bisa berdiri sendiri atau terkait. Kelima motif itu adalah; psikologi, sosial, keagamaan ekonomi dan politik.

- a. Motif psikologis, pada motif ini rasa puas, ingin berprestasi atau rasa telah mencapai sesuatu adalah sebagian dari motif psikologis seseorang dalam berpartisipasi. Oleh karena itu meningkatkan partisipasi berarti juga memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengekspresikan diri dan aspirasinya.
- b. Motif sosial, motif ini mempunyai dua sisi yakni untuk memperoleh status sosial dan untuk menghindarkan dari sanksi sosial. Seseorang akan dengan suka hati berpartisipasi, manakala keikutsertaan itu dapat meningkatkan status sosialnya. Pada sisi yang negatif, orang akan “terpaksa” berpartisipasi karena takut terkena sanksi sosial (tersisih) atau dikucilkan oleh warga masyarakat).
- c. Motif keagamaan, motif ini hanya didasarkan untuk semata-mata beribadah secara ikhlas. Motif partisipasi ini dalam

pembangunan hanya berorientasi pada kehidupan spiritualitas untuk kehidupan kelak di akhirat.

- d. Motif ekonomi, cara berfikir secara hukum ekonomi (untung dan rugi) dapat mempengaruhi orang untuk berpartisipasi. Kalau partisipasi seseorang dapat menguntungkan dirinya/perusahaannya maka hal itu akan dilakukan terus, supaya usaha atau bisnisnya tidak merugi.
- e. Motif politik, dasar utama motif politik adalah kekuasaan. Oleh karena itu partisipasi seseorang atau golongan akan ditentukan oleh besar kecilnya kekuasaan yang diperoleh dari partisipasinya itu. Maka makin besar kekuasaan yang mungkin di dapatnya, maka makin besar pula motivasinya untuk berperan serta.²²

Oleh karena itu pemerintah harus berusaha agar masyarakat mau berpartisipasi dalam kegiatan politik salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melalui komunikasi politik dimana dalam komunikasi politik ada yang namanya fungsi informasi yaitu penyampaian pesan-pesan yang berkaitan dengan politik seperti visi,

²² Entus Sukria, *Simpul-Simpul Dinamika Strategi Pembangunan "Good Governance"* (Jakarta : Titian Kencana Mandiri, 2005), h.53-54.

misi, sasaran, tujuan atau arah kebijakan baik dari partai politi maupun dari aktor politik lainnya.²³

E. Stratifikasi Sosial dan Partisipasi Politik

Stratifikasi sosial dilihat melalui bagaimana masyarakat melakukan penggolongan individu secara berlapis berdasarkan kekuasaan, prestise, pendidikan dan sebagainya. Jika ditelisik secara lebih dalam tentang stratifikasi sosial, terutama pandangan Max Weber dan Benhard Lenski, maka disimpulkan konsep partai politik dari Weber dan konsep kekuasaan dari Lenski sebagai dimensi pelapisan. Perbedaan individu dalam kaitan keterlibatannya dengan kekuasaan menjadikan individu dibedakan dengan individu lainnya. Individu yang mempunyai keterlibatan intens dengan partai politik, katakanlah sebagai pengurus partai politik, seperti yang ditegaskan oeh Max Weber, dilihat memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak pernah bersentuhan dengan partai politik sama sekali.

Perbedaan strata dalam hubungannya dengan partai politik, secara implisit mengisyaratkan bahwa stratifikasi sosial memiliki hubungan dengan partisipasi politik. Individu-individu yang berkarier

²³ Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h.171.

dalam partai politik tidak hanya memikirkan bagaimana mereka memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya, tetapi juga bagaimana mereka memerhatikan dan mengantisipasi bahwa setiap tindakan mereka memiliki suatu implikasi politik. Dengan demikian keterlibatan mereka dalam partai politik bertujuan untuk meraih dan mempertahankan kewenangan, memengaruhi kehidupan dan kebijakan publik, pemerintahan, negara, serta menghadapi konflik dan melakukan resolusi konflik.

Stratifikasi sosial yang sering dihubungkan dalam pembahasan tentang pengaruhnya dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik mereka, adalah status sosial ekonomi. Dalam status sosial ekonomi terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan analisis tentang suatu hubungan atau pengaruh, yaitu antara lain pendidikan, pekerjaan, pendapatan atau kekayaan.

Asumsi teoritis tentang hubungan atau pengaruh yang dibangun oleh para ahli adalah sebagai berikut : ”partisipasi politik cenderung lebih tinggi pada kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi, memiliki pekerjaan lebih bagus, mempunyai pendapatan lebih tinggi dan memiliki kekayaan lebih banyak dibandingkan dengan kelompok

masyarakat berpendidikan rendah, memiliki pekerjaan kurang bagus, mempunyai pendapatan rendah dan memiliki kekayaan yang sedikit.”²⁴

Pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik di dalam direct democracy dan participatory democracy acapkali dikaitkan dengan realitas tentang penurunan pandangan bahwa para wakil di lembaga-lembaga perwakilan politik itu sudah tidak cukup mampu menjalankan fungsinya (deficiencies of representative politics). Pandangan demikian terlihat dari menurunnya tingkat kepercayaan (trust) dari terwakil kepada para wakil yang terjadi di banyak negara, termasuk di negara-negara yang telah mapan demokrasinya. Adanya disconnect electoral antara wakil dan terwakil acapkali membuat terjadinya kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh para terwakil dengan para wakil. Selain itu perwakilan juga dilihat sebagai ‘a malfunctioning system’ yang dianggap bisa membahayakan demokrasi, khususnya sistem perwakilan yang didasarkan pluralism yang dikritik lebih mengedepankan ‘vested interests’ daripada kepentingan umum.

Sejumlah ilmuwan politik memahami penurunan trust itu berkaitan dengan kinerja perekonomian suatu pemerintahan.

²⁴ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*,, h.199-200.

Sebagaimana dikemukakan oleh Luke Keele, '*when citizens are dissatisfied with economic performance, distrust of government ensues, but when prosperity abounds, so will trust*'. Kinerja pemerintahan yang dinilai memang bukan sebatas pada bagaimana pemerintah mengelola perekonomian, melainkan juga kemampuan lain seperti kemampuan mengontrol kriminalitas, menciptakan rasa aman dan menghindari berbagai skandal. Karena itu, ada tidaknya trust itu juga berkait dengan tindakan para pemimpin politik. Manakala pemimpin itu terlibat di dalam skandal dan media menyiarkan secara luas skandal itu, trust terhadap pemerintah akan mengalami penurunan.²⁵

Lebih jauh, Keele juga menambahkan bahwa trust terhadap pemerintah itu juga berkaitan dengan modal sosial (*social capital*). Secara sederhana, modal sosial berarti adanya keterkaitan, jaringan dan trust antar anggota di dalam suatu komunitas. Karena itu, ada dua aspek penting di dalam modal sosial. Pertama adalah berkaitan dengan tingkat keterlibatan warga negara (*civic engagement*) di dalam suatu kelompok, negara atau bangsa. Kedua adalah adanya trust antar anggota, atau adanya keinginan untuk berbuat baik kepada yang lain.²⁶

²⁵ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta : Kencana 2010), h. 56.

²⁶ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, ...*, h.144.

Meskipun partisipasi merupakan salah satu elemen dasar di dalam polyarchy, nama lain dari demokrasi menurut Robert Dahl (1971), di dalam demokrasi perwakilan partisipasi itu lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warga negara di dalam pemilu. Hal ini contohnya terlihat dari penjelasan Joseph Schumpeter salah satu ilmuwan politik penganut demokrasi elitis (perwakilan). Dalam pandangan dia, peran politik warga negara adalah pada pemilu, sementara para pemimpin yang terpilih merupakan orang-orang kunci di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan. Dalam buku yang dikutip oleh Kacung Marijan, Joseph Schumpeter mengatakan:

*The role of the people is to produce a government...the voters outside of parliament must expect the division of labour between themselves and the politician they elect. they must not withdraw confidence to easily between election and they must understand that, one they have elected an individual, political action is his (her) business and not theirs. this mean that they must refrain from instructing him (her) about what he (she) is to do.*²⁷

F. Tingkatan Partisipasi Politik

Untuk menganalisis tingkat-tingkat partisipasi politik Huntington dan Nelson mengajukan dua kriteria penjelas. Pertama, dilihat dari ruang lingkup atau proporsi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.

²⁷ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia,*, h. 112-113

Kedua, intensitasnya atau ukuran, lamanya dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.

Hubungan antara dua kriteria tersebut di atas cenderung diwujudkan dalam hubungan "berbanding terbalik". Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misal partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, maka intensitasnya semakin tinggi. Contoh, kegiatan aktivis-aktivis partai politik, pejabat partai politik, kelompok-kelompok penekan. jadi dalam hal ini, terjadi hubungan, "semakin luas ruang lingkup partisipasi politik maka semakin rendah atau kecil intensitasnya, dan sebaliknya semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi".²⁸

Praktik partisipasi politik dari yang terendah ke yang tertinggi yaitu pengamat, partisipan dan aktivis. Praktik-praktik partisipasi politik di tingkatan kategori pengamat, seperti menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik, dan usaha meyakinkan orang lain, merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara,

²⁸ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*,, h.237.

artinya proporsi atau lingkup jumlah orang yang terlibat di dalamnya tinggi. Namun tidak demikian dengan intensitas partisipasi politiknya, terutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem politik, praktik-praktik tersebut tingkat signifikannya rendah, atau tingkat efektifitasnya dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak.

Berbeda halnya dengan praktik-praktik partisipasi politik di tingkatan kategori aktivis, para pejabat umum, pejabat partai penuh waktu, pimpinan kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik, mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan *contacting* dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah menjadi sangat efektif, terutama bagi pejabat umum, secara politis mereka memiliki peluang yang cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara langsung. Warga Negara yang terlibat dalam praktik-praktik partisipasi politik ditingkatan aktivis jumlahnya terbatas, hanya diperuntukan bagi sejumlah kecil orang (terutama elit politik), yang memiliki kesempatan

untuk terlibat dalam proses politik dengan mekanisme dan kekuatan pengaruh seperti ini.²⁹

Kegiatan politik tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan, jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti banyaknya yang memberikan suara dalam pemilu. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin dari partai atau kelompok kepentingan.

Ciri-ciri sosial tertentu tampak sangat penting dalam memberikan kesempatan dan kecakapan politik kepada setiap individu. Pendidikan tinggi mempengaruhi partisipasi politik. Oleh sebab itu, banyak negara memperbaharui kurikulum sekolah untuk dapat berpengaruh terhadap proses sosialisasi politik kaum muda. Orang yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi maka akan lebih aktif. Partai politik berpengaruh besar dalam partisipasi politik. Ledakan tuntutan

²⁹ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*,, h.238-239.

partisipasi adalah keyakinan yang tersebar luas bagi kalangan kaum muda terhadap demokrasi partisipan. Dorongan utamanya karena di negara demokratikpun para pengambil keputusan masih tetap orang-orang yang masih mapan (establishment). Oleh sebab itu, para penganjur demokrasi partisipan dan para pembuat keputusan politik agar membawa permasalahan politik ke tingkat masyarakat umum, agar masyarakat dapat menguasai masalah dan bertindak secara politik demi kepentingan mereka.³⁰

Bentuk dan sifat partisipasi politik jelas berbeda dari satu tipe sistem politik dengan yang lain, walaupun ada terdapat lembaga politik yang nyata sama, seperti adanya pemilihan atau partai politik. Betapapun juga meskipun terdapat perbedaan tadi semua sistem politik tampaknya memperlihatkan jenis relasi tertentu diantara partisipasi politik dengan karakteristik pribadi dan sosial dari mereka yang aktif secara politis. Sifat relasi ini bergantung pada lingkungan sosial dan lingkungan politik setiap sistem politik. Kebanyakan negara demokrasi modern memiliki lingkungan sosial yang ditandai oleh suatu sistem stratifikasi sosial dan ekstensif, namun relatif luwes dan suatu lingkungan politik yang secara ideologis berusaha mendorong

³⁰ Syahril Syarbaini, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik (Bogor : Ghalia, 2013)*, h. 125.

berlangsungnya partisipasi politik. Masyarakat primitif memberikan suatu lingkungan sosial dan lingkungan politik yang terintegritas , dalam situasi mana perbedaan dalam kegiatan politik dan aktivitas jenis lainnya kurang menonjol jika dibandingkan dengan kondisi di masyarakat lebih maju.³¹

Jika partisipasi masyarakat dalam politik tinggi itu bisa diindikasikan atau dikelompokkan ke dalam masyarakat madani dimana masyarakat madani sendiri menurut Hikam merupakan :

“ Suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas (Marx) serta memiliki kapasitas politik yang tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang (balancing force) dari kecenderungan intervensionis negara (Hegel) dan pada saat yang sama mampu pula menjadi kekuatan reflektif kritis tidak hanya terhadap lingkungan eksternalnya tetapi juga dirinya sendiri. ”³²

³¹ Michael Rush , Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011) Cet. 14, h.176-177.

³² Adi Suryadi, *Masyarakat Madani* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), h.123.